

Drs. H. M. Goodwill Zubir : 4 Agenda Besar RAKERNAS Majelis Wakaf & Kehartabendaan PP Muhammadiyah 2016

Senin, 04-09-2016



JAKARTA – Usai sudah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang diselenggarakan sejak Jumat lalu hingga besok Ahad 4 September 2016 di STMIK Muhammadiyah Jakarta. Berikut empat agenda besar Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pimpinan Pusat Muhammadiyah hasil wawancara kontributor ogankomulutim.muhammadiyah.or.id dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Drs. H. M. Goodwill Zubir.

Agenda pertama adalah sertifikasi tanah-tanah persyarikatan berikut aset-asetnya. Menurut beliau, sampai hari ini data yang didapat dan terdata hanya 25%, artinya masih banyak tanah-tanah persyarikatan yang atas nama pribadi sungguhpun ia adalah pengurus. Oleh karena Muhammadiyah adalah berbadan hukum maka MKW ingin periode ini 90% tanah-tanah dan aset-asetnya bisa menjadi hak milik Persyarikatan Muhammadiyah yg berkedudukan di Yogyakarta dan di Jakarta.

Kedua, inventarisasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berupaya menghimbau, mengirim surat, sosialisasi kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah hingga Pimpinan Ranting Muhammadiyah agar

memberikan data yang benar, sehingga data-data yang diterima oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi

Kedua, inventarisasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berupaya menghimbau, mengirim surat, sosialisasi kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah hingga Pimpinan Ranting Muhammadiyah agar memberikan data yang benar, sehingga data-data yang diterima oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi valid dan terpercaya juga tidak ada perbedaan-perbedaan data. Beliau sangat berharap inventarisasi ini dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, Pemberdayaan. Dengan adanya banyak tanah wakaf dan aset yang nganggur dapat membuat muwafiq kecewa karena yang diwakafkan tidak digunakan sehingga tidak bermanfaat maka dengan memberdayakan aset-aset tersebut diharapkan tidak ada lagi lahan-lahan yang tidur dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dan yang keempat adalah pendampingan aset-aset bermasalah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berniat mendampingi Pimpinan Ranting hingga Pimpinan Wilayah untuk menyelesaikan persengketaan di pengadilan dari tingkat paling bawah hingga ke Mahkamah Agung. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga melibatkan para profesional dan praktisi dalam pendampingan ini.

Abdul Muhith/GD